

ABSTRAK

SARI NURAINI: “Perlawanan (Resistensi) Pedagang Kaki Lima Terhadap Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Wilayah Cicadas Kota Bandung)”.

Penelitian ini bermula dari munculnya Perda No 04 Tahun 2011 pasal 20 (b) dan pengamanan Satpo PP terhadap keberadaan PKL yang berada di Cicadas kota Bandung. Hal tersebut memicu perlawanan (resistensi) PKL di wilayah Cicadas demi mempertahankan lahan dagangannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlawanan pedagang kaki lima terhadap pengamanan Satpol PP, faktor penyebab terjadinya perlawanan pedagang kaki lima terhadap pengamanan Satpol PP, dan dampak yang terjadi setelah timbulnya perlawanan pedagang kaki lima di wilayah Cicadas kota Bandung terhadap pengamanan Satpol PP.

Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai bentuk analisis wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial bahwa, distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata akan jadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Dan teori fungsional konflik Lewis A. Coser sebagai analisis fungsi konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali sumber-sumber informasi dan menggunakan metode deskriptif untuk memusatkan perhatian pada masalah yang sedang diteliti serta menggambarkan fakta-fakta masalah yang diselidiki secara sistematis, faktual dan akurat. Dan akan diuraikan mengenai pengolahan data, penafsiran data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bentuk perlawanan pedangan kaki lima terhadap pengamanan Satpol PP dan juga kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan aksi unjuk rasa dari pedagang kaki lima di Cicadas, penolakan dari kebijakan pemerintah untuk tempat relokasi yang tidak sesuai, tetap berjualan di Cicadas dan menghadang Satpol PP ketika melakukan pengamanan dan razia. Selain itu faktor yang mempengaruhi perlawanan pedagang kaki lima di Cicadas yaitu karena minimnya modal untuk membeli lapak berjualan, faktor tuntutan ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan, menunggu tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah dan juga ada rasa memiliki dari para pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di Cicadas. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari perlawanan pedagang kaki lima di Cicadas tersebut sudah jarangnyanya ada razia dari Satpol PP, masih bisa menggelar dagangannya, dan menunggu Teras Cicadas yang dijanjikan walikota.